



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PERUBAHAN RENJA



KECAMATAN MERAWANG

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dapat diselesaikan. OPD Kecamatan Merawang melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2021 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan rencana program dan kegiatan Renja tahun 2021.

Selain itu, belum meredanya pandemi covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 belum stabil, yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan secara nasional yang berdampak pada Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana OPD Kecamatan Merawang juga terdampak harus menyesuaikan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2021. Untuk itu, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras dan keikhlasan semua pihak guna mewujudkan **BANGKA SEJAHTERA DAN MULIA**.

Baturusa, 20 Agustus 2021

CAMAT MERAWANG,



JALEARI, S.STP.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP.19820130 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud Dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Evaluasi Renja s.d Tahun Berjalan	5
2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan s.d Semester I Tahun 2021	12
2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2021	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	
- SK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	6
TABEL 2.2 Realisasi Keuangan s.d Semester I Tahun 2021	12
TABEL 2.3 Review Kebutuhan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten	17
TABEL 3.1 Rekapitulasi Perubahan Program/Kegiatan dan Sub kegiatan	26
TABEL 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program/Kegiatan dan Sub kegiatan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Trwulan I Tahun berjalan. Tahapan penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perubahan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 Lingkup Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2021.

2.1. Evaluasi Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Merawang s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran R PJMD Kabupaten s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan R ealisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											I		II																			
1	2	3					4		5	6		7		8		9				10				13				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K		Rp			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		7																														
		7	01																													
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	7	01	01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	28,00	2.605.900.000			25,00	3.335.487.650	0,00		478.443.959			799.134.321	0,00		1.277.578.280	0		1.277.578.280	49,03	0,00	KEC. MERAWANG
											Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,35				10,20		0,00														
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah										Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00																
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah										Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	64,44				63,80		0,00														
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah										Indeks Sarana dan Prasarana	80				60		0,00														
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah										Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2,05				1,50		0,00														
		7	01	01	2	01				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	41.200.000			100	8.400.000			-			-			-			-			
											Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100																

PERUBAHAN RENJA KEC.MERAWANG

		7	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun(dokumen)	19	15.450.000			7	3.675.000	57,14	4		28,57	2	-	85,71	6	-	6		-	31,58	0,00	
		7	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yangdisusun (dokumen)	57	25.750.000			19	4.725.000	36,84	7		21,05	4	-	57,89	11	-	11		-	19,30	0,00	
		7	01	01	2	02	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	2.671.500.000			12	2.465.744.000	0,00		369.334.960			567.486.070			936.821.030			936.821.030			
		7	01	01	2	02	01	SubKegiatanPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani (bulan)	36	2.626.500.000			12	2.465.744.000	25,00	3	369.334.960	25,00	3	567.486.070	50,00	6	936.821.030	6	936.821.030	16,67	35,67		
		7	01	01	2	02	07	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triw ulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (dokumen)	42	45.000.000			14	-	21,43	3,00	-	28,57	4	-	50,00	7	-	7	-	16,67	0,00		
		7	01	01	2	05	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat Pengembangan	46,67	159.650.000			26,67	59.648.000	0,00		-			-			-		-				
									Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100				100	0,00															
									Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100				100	0,00															
		7	01	01	2	05	02	SubKegiatan Pengadaan PakaianDinas BesertaAtribut Kelengkapannya	JumlahPakaian Dinas Harian Yang Tersedia (stell)	81	108.150.000			0,00	34.660.000	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
									Jumlah pakaian olahraga yangtersedia (stell)	48				16	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
									Jumlah pakaian adatyang tersedia(stell)	81				27	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
									Jumlah pakaianPaskibra yang tersedia (stell)	70				10	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
									Jumlah pakaianPeserta MTQ Tk.Kabupaten yang tersedia(stell)	105				35	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
									Jumlah pakaianolahraga paskibra (stell)	60				0,00	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
									Jumlah pakaian PDU Camatyang tersedia (stell)	1				1	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00				
		7	01	01	2	05	09	SubKegiatanPendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	12	51.500.000			1	24.988.000	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		7	01	01	2	06	06	Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80	211.150.000			60	123.514.000			-			13.987.500			13.987.500			13.987.500			

PERUBAHAN RENJA KEC.MERAWANG

			7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	128.750.000			12	123.514.000	25,00	3	-	25,00	3	13.987.500	50,00	6	13.987.500	6	13.987.500	16,67	10,86	
									Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Tertangani (bulan)	36	82.400.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3	-	50,00	6	-	6	-	16,67			
			7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80	690.100.000			60	19.052.900			-			-			-		-			
			7	01	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (unit)	3	309.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
			7	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Diadakan (unit)	158	39.140.000			50	10.031.800	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
			7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	12	187.460.000			4	9.021.100	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
			7	01	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	12	154.500.000			4	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
			7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	978.500.000			100	584.348.750			101.995.597	0,00		195.167.648			297.163.245		297.163.245			
									Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	3				3					0,00											
			7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	824.000.000			12	474.158.150	25,00	3	83.531.236	25,00	3	161.586.042	50,00	6	245.117.278	6	245.117.278	16,67	29,75	
			7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	36	61.800.000			12	53.292.550	25,00	3	8.152.557	25,00	3	13.816.500	50,00	6	21.969.057	6	21.969.057	16,67	35,55	
									Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	36				12		25,00	3		25,00	3	-	50,00	6	-	6	-	16,67			
									Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	36				12		25,00	3		25,00	3	-	50,00	6	-	6	-	16,67			
			7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	92.700.000			12	56.898.050	25,00	3	10.311.804	25,00	3	19.765.106	50,00	6	30.076.910	6	30.076.910	16,67	32,45	

PERUBAHAN RENJA KEC.MERAWANG

		7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	324.450.000				100	74.780.000	100		7.113.402	0,00		22.493.103	100		29.606.505		29.606.505			
		7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	9	77.250.000				3	60.300.000	100	3	7.113.402	0,00		22.493.103	100	3	29.606.505	3	29.606.505	33,33		
		7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	25.750.000				1	14.480.000	0,00	0	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00		
		7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	221.450.000				0	-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	92.700.000			77,99	29.800.000	0,00			-	0,00		-	0,00		-	0	-		0,00	KEC. MERAWANG
		7	01	02	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100	92.700.000			100	29.800.000				-			-			-		-			
		7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	6500	92.700.000			2000	29.800.000	0,00	0		-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100	216.300.000			100	124.044.350	0,00			-	0,00		10.118.000	0,00		10.118.000	2	10.118.000		4,68	KEC. MERAWANG
		7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100	216.300.000			100	124.044.350	0,00			-	0,00		10.118.000	0,00		10.118.000	0,00	10.118.000		4,68	
									Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100				100					0,00			100			100					
									Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100				100	0,00				0,00			0,00			0,00					
									Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100				100	0,00				50,00			50,00			50,00					
		7	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	3	41.200.000			1	14.985.350	100	1		-	0,00	0	10.118.000	100	1	10.118.000	1	10.118.000	33,33	24,56	
									Musrenbang Tingkat Desa (kali)	30				10		100	10		0,00	0		-	100	10	-	10	-	33,33		
		7	01	03	2	01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun (kali)	360	175.100.000			120	109.059.000	0,00	0		-	50,00	60	-	50,00	60		60		16,67		
									Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan (kali)	360				120		0,00	0		50,00	60		50,00	60		60		16,67			
									Penilaian lomba desa /Kel Tk. Kecamatan (kali)	3				1		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0,00			

PERUBAHAN RENJA KEC.MERAWANG

4	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	52.530.000			20	8.000.000	0,00		-	50,00		-	50,00		-	50	-		0,00	KEC. MERAWANG
		7	01	04	2	03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****	Persentase Tomas/ Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	94	52.530.000				8.000.000			-			-			-		-			
		7	01	04	2	03	02 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (kali)	360	52.530.000			24	8.000.000	0,00	0	-	50,00	12	-	50,00	12	-	12	-	3,33	0,00	
5	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016) (%)	100	115.000.000			100	36.700.000	20,00		-	30,00		17.100.000	50,00		17.100.000	50	17.100.000		14,87	KEC. MERAWANG
								Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar (%)	100			100																
		7	01	06	2	01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar (%)	100			100	36.700.000			-			17.100.000			17.100.000		17.100.000				
								Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa (%)	100			100																
		7	01	06	2	01	03 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	30	115.000.000			10	36.700.000	20,00	2	-	30,00	3	17.100.000	50,00	5	17.100.000	5	17.100.000	16,67	14,87	
								Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	30			10		20,00	2		30,00	3	-	50,00	5	-	5	-	16,67			

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan sebagaimana tertera pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian target tahun 2021 yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Dari 11 (sebelas) indikator Program, terdapat 6 (enam) indikator yang telah tercapai sedangkan 5 (lima) indikator program masih dalam proses pencapaian target.
 - b. Dari 18 (delapan belas) indikator Kegiatan, terdapat 11 (sebelas) indikator Kegiatan yang telah tercapai targetnya dan 7 (tujuh) indikator Kegiatan yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 32 (tiga puluh dua) indikator Sub Kegiatan, terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang telah tercapai targetnya dan 15 (lima belas) indikator yang masih dalam proses pencapaian targetnya.
2. Sehubungan dengan perkiraan pencapaian target Renstra Kecamatan Merawang Tahun 2019-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Reviu Renstra Kecamatan Merawang Tahun 2019-2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dari 11 (sebelas) indikator Program, terdapat 6 (enam) indikator yang telah tercapai sedangkan 5 (lima) indikator program masih dalam proses pencapaian target.
 - b. Dari 18 (delapan belas) indikator Kegiatan, terdapat 11 (sebelas) indikator Kegiatan yang telah tercapai targetnya dan 7 (tujuh) indikator Kegiatan yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 32 (tiga puluh dua) indikator Sub Kegiatan, terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang telah tercapai targetnya dan 15 (lima belas) indikator yang masih dalam proses pencapaian targetnya.

2.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2021.

Evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sampai dengan semester I Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Realisasi Keuangan Kecamatan Merawang Kabupaten
Bangka Sampai dengan Semester I Tahun 2021

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi sampai Semester I Tahun 2021	Persentase (%)	Sisa Anggaran
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.335.487.650	1.277.578.280	38,30	2.057.909.370
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.400.000	0,00	0,00	8.400.000
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3.675.000	0,00	0,00	3.675.000
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4.725.000	0,00	0,00	4.725.000
II	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.465.744.000	936.821.030	37,99	1.528.922.970
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN</i>	2.465.744.000	936.821.030	37,99	1.528.922.970
III	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.648.000	0,00	0,00	59.648.000
	<i>SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	34.660.000	0,00	0,00	34.660.000
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	24.988.000	0,00	0,00	24.988.000
IV	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	123.514.000	13.987.500	11,32	109.526.500
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	123.514.000	13.987.500	11,32	109.526.500
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.052.900	0,00	0,00	19.052.900
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	9.021.100	0,00	0,00	9.021.100
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	10.031.800	0,00	0,00	10.031.800
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	584.348.750	297.163.245	50,85	287.185.505

	SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	474.158.150	245.117.278	51,69	229.040.872
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.292.550	21.969.057	41,22	31.323.493
	SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.898.050	30.076.910	52,86	26.821.140
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.780.000	29.606.505	39,59	45.173.495
	SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.300.000	29.606.505	49,09	30.693.495
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.480.000	0,00	0,00	14.480.000
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.800.000	0,00	0,00	29.800.000
VIII	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.800.000	0,00	0,00	29.800.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	29.800.000	0,00	0,00	29.800.000
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.044.350	10.118.000	8,15	113.926.350
IX	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124.044.350	10.118.000	8,15	113.926.350
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.985.350	10.118.000	67,51	4.867.350
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109.059.000	0,00	0,00	109.059.000
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.000.000	0,00	0,00	8.000.000
X	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	0,00	0,00	8.000.000

	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)</i>	8.000.000	0,00	0,00	8.000.000
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.700.000	17.100.000	46,59	19.600.000
XI	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.700.000	17.100.000	46,59	19.600.000
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	36.700.000	17.100.000	46,59	19.600.000
	JUMLAHTOTAL	3.534.032.000	1.304.796.280	36,92	2.229.235.720

Hasil dari evaluasi kinerja keuangan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021, yang terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan, tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 38,30 %. Program ini terdiri dari :

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 0 %. Program ini terdiri dari :
Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 8,15 %. Program ini terdiri dari :

Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 0 %. Program ini terdiri dari :

Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 46,59 %. Program ini terdiri dari :
Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian renja sampai triwulan II TA. 2021 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka maupun Instansi kerja sehingga menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan. Dan juga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas.

2.3. Review Terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021. Secara keseluruhan, hasil telaahan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Kebutuhan Kecamatan Merawang Terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021						Hasil Analisa Kebutuhan Perangkat Daerah					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.	KECAMATAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	24,50	3.335.487.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	24,50	3.481.451.600	
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,90				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,90		
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	8.400.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	8.400.000	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	14 Dokumen	3.675.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	14 Dokumen	3.675.000	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	14 Dokumen	4.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	14 Dokumen	4.725.000	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan	0%		

			Perangkat Daerah dalam LHPBPK-RI					Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI			
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.465.744.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.465.744.000	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	2.465.744.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	2.465.744.000	
			Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	14 Laporan				Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	63,90				Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	63,90		
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	19,04	59.648.800	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	19,04	34.660.000	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%				Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah pakaian olah raga yang Tersedia	16	34.660.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16	34.660.000	
			Jumlah pakaian olahraga paskibraka yang tersedia (pcs)	30				Jumlah pakaian olahraga paskibraka yang tersedia (pcs)	30		
			Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia (stell)	16				Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia (stell)	16		
			Jumlah pakaian peserta official MTQ Ke Kabupaten (pcs)	30				Jumlah pakaian peserta official MTQ Ke Kabupaten (pcs)	30		

			Jumlah seragam paskibraka yang tersedia (stell)	10				Jumlah seragam paskibraka yang tersedia (stell)	10		
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non Formal	2	24.988.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	0	0.00	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100		
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	123.514.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	123.514.000	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	123.514.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	123,514.000	
			Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan				Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan		
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	19.052.900	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	19.052.900	
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah mebel kantor yang diadakan	2 Unit	10.031.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah mebel kantor yang diadakan	2 Unit	10.031.800	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan	2 Unit	9.021.100	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan	2 Unit	9.021.100	

			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50		
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	584.348.750	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	648.550.700	
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		
7.01.01.2.08.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>474.158.150</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>595.258.150</i>	
7.01.01.2.08.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>53.292.550</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>53.292.550</i>	
7.01.01.2.08.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>56.898.050</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>69.798.050</i>	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100		
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	74.780.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	81.530.000	

7.01.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan	60.300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan	67.050.000	
7.01.01. 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	14.480.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	14.480.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.800.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86				Indeks Kepuasan Masyarakat	86		
7.01.02. 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan (%)	100%	29.800.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan (%)	100%	29.800.000	
7.01.02.2. 04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	2954 Dokumen	29.800.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	2954 Dokumen	29.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				124.044.350	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				104.044.350	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86				Indeks Kepuasan Masyarakat	86		
7.01.03.	Kegiatan		Persentase	100	124.044.350	Kegiatan		Persentase	100	104.044.350	

2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa		Lembaga kemasyarakatan yangdibina (%)			Koordinasi Pemberdayaan Desa		Lembaga kemasyarakatan yangdibina (%)			
			Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang(%)	100				Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang(%)	100		
			Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk. Kecamatan (%)	100				Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk. Kecamatan (%)	100		
			Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong (%)	100				Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong (%)	100		
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Bangka	Musrenbang Tk Kecamatan (kali)	1	14.985.350	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungailiat	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	1	14.985.350	
			Musrenbang Tingkat Desa (kali)	10				Musrenbang Tingkat Desa (kali)	10		
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka,	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan (lembaga)	1	109.059.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka, luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun (kali)	1	89.059.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				8.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				8.000.000	

	UMUM		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100		UMUM		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100		
7.01.04.2.03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)		Persentase Tomas/Toga/Top a yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	100	8.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)		Persentase Tomas/Toga/Top a yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	100	8.000.000	
7.01.04.2.03.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Kab. Bangka	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (bulan)	12	8.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kab. Bangka	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (bulan)	12	8.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				36.700.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				36.700.000	
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016) (%)	100				Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016) (%)	100		
			Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar (%)	100				Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar (%)	100		
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar (%)	100	36.700.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)		Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar (%)	100	36.700.000	
			Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring	100				Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring	100		

			keuangan desa (%)					keuangan desa (%)			
7.01.06.2. 01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	10	36.700.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	10	36.700.000	
			Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	10				Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	10		
					3.534.032.000					3.659.995.950	

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Merawang pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Merawang Tahun 2021.

Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dilaksanakan penambahan pagu indikatif diantaranya penambahan anggaran untuk makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD serta penambahan anggaran untuk gaji pegawai tidak tetap/kontrak pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Meskipun begitu Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka juga melakukan penyesuaian melalui pengurangan kegiatan, pengurangan sub kegiatan serta pengurangan target output pada tataran sub kegiatan.

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	11	11	-
3.	Sub Kegiatan	18	17	(1)
4.	Ouput Sub Kegiatan	18	17	(1)

Sub kegiatan yang dihilangkan pada Perubahan Renja Kecamatan Merawang Tahun 2021 adalah :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah :

- Output sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berupa jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 2 orang.

Secara rinci, uraian program, kegiatan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH						:	KECAMATAN MERAWANG													
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Keterangan						
							Output	Target	Anggaran	Output	Target	Anggaran								
7																				
7						01														
7						01	06													
7						01	06	2	01											
7						01	06	2	01	03										
7						01	03													
7						01	03	2	01											
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										
7						01	03	2	01	01										

7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	100%	8.000.000	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	100%	8.000.000	-	
7	01	04	2	01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/ Toga/ Topa yg berperan aktif menjaga trantibum	100%	8.000.000	Persentase Tomas/ Toga/ Topa yg berperan aktif menjaga trantibum	100%	8.000.000	-	
7	01	04	2	01	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyara kat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	12 Bulan	8.000.000	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	120 Kali	8.000.000	-	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	29.800.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	29.800.000	-	
7	01	02	2	04		Kegiatan Pela ksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	29.800.000	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	29.800.000	-	
7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ter kait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2.954 Dokumen	29.800.000	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2.954 Dokumen	29.800.000	-	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	24,50	3.335.487.650	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	24,50	3.478.451.600	142.963.950	
						Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	10,90	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)		10,90				
						Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%				
7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perang kat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	8.400.000	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	8.400.000	-	
						Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				
7	01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	14 Dokumen	3.675.000	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	14 Dokumen	3.675.000	-	
7	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun	14 Dokumen	4.725.000	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun	14 Dokumen	4.725.000	-	

7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.465.744.000	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.465.744.000	-	
7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	2.465.744.000	Jumlah layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	2.465.744.000	-	
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	19,04	59.648.000	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	19,04	34.660.000	-	24.988.000
							Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			
							Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%			
7	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia		34.660.000	Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia		34.660.000	-	
							Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	16 Stel		Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	16 Stel			
							Jumlah pakaian olahraga paskibraka yang tersedia	30 Pcs		Jumlah pakaian olahraga paskibraka yang tersedia	30 Pcs			
							Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia	16 Stel		Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia	16 Stel			
							Jumlah pakaian peserta official MTQ Ke Kabupaten	30 Pcs		Jumlah pakaian peserta official MTQ Ke Kabupaten	30 Pcs			
							Jumlah seragam paskibraka yang tersedia	10 Stel		Jumlah seragam paskibraka yang tersedia	10 Stel			
7	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	24.988.000	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	-	-	24.988.000
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	123.514.000	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		223.514.000	100.000.000	
7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan	123.514.000	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan	223.514.000	100.000.000	
							Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	12 Bulan		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	12 Bulan			

7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.052.900	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.052.900	-	
7	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	2 Unit	10.031.800	Jumlah mebel kantor yang diadakan	2 Unit	10.031.800	-	
7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	9.021.100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	9.021.100	-	
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	74.780.000	Persentase BMD dalam kondisi baik		81.530.000	6.750.000	
7	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan	60.300.000	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan	67.050.000	6.750.000	
7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	14.480.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	14.480.000	-	
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	584.348.750	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	645.550.700	64.201.960	
							Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	474.158.150	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	592.258.150	121.100.000	
7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	53.292.550	Jumlah layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	53.292.550	-	
7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	56.898.050	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	69.798.050	12.900.000	
									3.534.032.000			3.656.995.950	125.963.950	

Perubahan Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2021 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Merawang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing- masing.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KECAMATAN MERAWANG

Jalan Depati Amir No.6, BATURUSA Kode Pos : 33172

Telepon/Fax. (0717) 4261287

KEPUTUSAN CAMAT MERAWANG KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45/ 48.b /19.01.03/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

CAMAT MERAWANG KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Merawang Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021;
- d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Kepala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a t u r u s a
pada tanggal 02 Juli 2021

CAMAT MERAWANG,



JALEARI, S.STP.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19820130 200112 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MERAWANG
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ 48.b /19.01.03/2021
TANGGAL : 02 Juli 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Jaleari, S.STP, M.Si	Ketua
2.	Dimas Julian, S.STP	Wakil Ketua
3.	Napsiah, S.I.Kom	Anggota
4.	Sanjaya, A.Md, S.AP	Anggota
5.	Alamsyah Amir Syarifuddin	Anggota
6.	Yuniarsi, S.Mn	Anggota
7.	Fatihah, S.TP	Anggota
8.	Affandi, S,E	Anggota

Ditetapkan di Baturusa
pada tanggal 02 Juli 2021

CAMAT MERAWANG,



JALEARI, S.STP.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19820130 200112 1 005